

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 DENGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG	TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA TIMUR,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA TIMUR,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024.</p>	<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peratutran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</li> </ol>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024</p>
<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020--2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 10);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dua kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024</p>
<p>Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemcaanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur ( Lembaran Daeran Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 28) Sebagaimana telah d.iubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 16);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolak:a Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</p>	<p>Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 28) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 16);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026 (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 13);</p> <p>15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 19 Tentang Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024;</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021- 2026 (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 13);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;</li> <li>7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;</li> </ol>	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur;</li> <li>6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) Bulan;</li> <li>7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;</li> </ol>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024</p>
<p>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;</p> <p>10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah.</p>	<p>8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>9. Kebijakan Perubahan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA-P adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 6 (enam) Bulan;</p> <p>10. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah;</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>1) RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024</p> <p>2) RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :</p> <p style="padding-left: 20px;">Bab I : Pendahuluan. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab VII : Penutup.</p> <p>3) Naskah RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) RKPD-P Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 01 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;</p> <p>(2) RKPD-P sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2), (3) disusun dengan sistematika sebagai berikut ;</p> <p style="padding-left: 20px;">Bab I : Pendahuluan. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan 11 (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Bab VI : Penutup.</p> <p>(3) Naskah RKPD-P Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>1) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 serta arah kebijakan dan isu strategis RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024.</p> <p>2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) RKPD-P Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan saaraan pokok RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 serta arah kebijakan dan isu strategis RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024;</p> <p>(2) RKPD-P Tahun 2024 sebagaimana di makaud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Kepala Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordirasi dengan instansi terkait dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah Tahun 2024.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>RKPD-P tahun 2024 mcnjadi dasar penyueunan KUA-P Tahun Anggaran 2024 dan PPAS-P Tahun Anggaran 2024;</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kepala Perangkat Daerah bersama Bappeda Litbang Kolaka Timur melakukan penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.</p>	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2024</p>
<p>Ditetapkan di Tirawuta Pada tanggal 4 Juli 2023 Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR, ABD. AZIS Diundangkan di Tirawuta Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, ANDI MUH. IQBAL TONGASA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR</p>	<p>Ditetapkan di Tirawuta Pada tanggal 30 Juli 2024 BUPATI KOLAKA TIMUR, ABD. AZIS Diundangkan di Tirawuta Pada tanggal 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, ANDI MUH. IQBAL TONGASA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR</p>